

Konstruksi Sosial Perempuan dalam Budaya Bugis: antara Adat dan Patriarki

A.Noer Chalifah Ramadhany*¹, Muh. Rijal², Andi Sadriani³, Watif Massuanna⁴

¹ Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Makassar, a.noer.chalifah@unm.ac.id

² Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Makassar, muh.rijal@unm.ac.id

³ Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Makassar, andi.sadriani@unm.ac.id

⁴ Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Makassar, m.watif.massuanna@unm.ac.id

Abstrak: Penelitian ini menganalisis konstruksi sosial perempuan dalam budaya Bugis dengan meyoroti relasi antara adat (pangadereng) dan patriarki. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan kualitatif dan analisis terhadap sumber ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan Bugis berada dalam posisi ambivalen, yaitu sebagai simbol kehormatan melalui nilai siri', sekaligus sebagai subjek yang mengalami kontrol sosial berbasis norma patriarkal. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung memandang adat sebagai sistem statis, penelitian ini menemukan bahwa adat merupakan arena negosiasi dinamis yang memungkinkan perempuan menafsirkan ulang nilai budaya untuk memperluas perannya. Selain itu, sistem lima gender dalam budaya Bugis tidak sepenuhnya mencerminkan kesetaraan, melainkan menunjukkan inklusivitas terbatas dalam praktik sosial. Penelitian ini menawarkan konsep negosiasi kultural gender dan model triadik konstruksi gender Bugis sebagai kontribusi teoritis untuk memahami interaksi antara adat, patriarki, dan agensi perempuan.

Keywords: konstruksi sosial; perempuan Bugis; nilai adat; patriarki; gender

DOI: <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v6i2.436>

*Correspondensi: A.Noer Chalifah Ramadhany

Email: a.noer.chalifah@unm.ac.id

Received: 30-03-2026

Accepted: 15-04-2026

Published: 16-04-2026



Copyright: © 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

triadic model of Bugis gender construction as a theoretical contribution to understanding the interaction between custom, patriarchy, and women's agency.

Abstrak: This study analyzes the social construction of women in Bugis culture by highlighting the relationship between custom (pangadereng) and patriarchy. The method used is literature review with a qualitative approach and analysis of relevant scientific sources. The results of the study indicate that Bugis women are in an ambivalent position, namely as a symbol of honor through the value of siri', while also as subjects experiencing social control based on patriarchal norms. In contrast to previous studies that tend to view custom as a static system, this study finds that customs is an arena for dynamic negotiation that allows women to reinterpret cultural values to expand their roles. Furthermore, the five gender system in Bugis culture does not fully reflect equality, but rather shows limited inclusivity in social practices. This study offers the concept of cultural gender negotiation and a

Keywords: Social construction: Bugis women; customary values; patriarchy; gender

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, isu kesetaraan gender dalam masyarakat lokal Indonesia semakin mendapatkan perhatian, termasuk dalam budaya Bugis di Sulawesi Selatan. Meskipun perempuan Bugis secara kultural dihormati sebagai penjaga *siri'* (harga diri) keluarga, dalam praktik sosial sehari-hari mereka masih menghadapi berbagai bentuk pembatasan peran, khususnya dalam akses terhadap ruang publik dan pengambilan keputusan (Darmayanti et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan adanya kontradiksi antara posisi simbolik perempuan yang dihormati dan realitas sosial yang

cenderung subordinatif. Secara empiris, perubahan sosial seperti meningkatnya akses pendidikan, urbanisasi, dan keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi telah mendorong pergeseran peran perempuan Bugis. Perempuan tidak lagi hanya berada dalam ranah domestik, tetapi juga aktif dalam berbagai sektor publik, termasuk pendidikan, birokrasi, dan ekonomi informal.

Namun demikian, perubahan ini tidak sepenuhnya diiringi dengan perubahan cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Norma-norma adat yang sarat dengan nilai patriarki masih kuat memengaruhi ekspektasi sosial terhadap perempuan, terutama terkait peran domestik dan moralitas (Zainal, 2016). Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas posisi perempuan dalam budaya Bugis. Studi Idrus menunjukkan bahwa perempuan Bugis memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya sekaligus menegosiasikan kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat (Idrus, 2018).

Penelitian lain oleh Resty yang menyoroti bagaimana perempuan Bugis mengalami beban ganda akibat tuntutan peran domestik dan publik (Darmayanti et al., 2025). Sementara itu, Rahmi mengkaji konsep *siri' na pacce* sebagai nilai budaya yang mengatur relasi sosial, termasuk dalam membentuk ekspektasi terhadap perilaku perempuan (R et al., 2025). Di sisi lain, Davies menyoroti kompleksitas sistem gender Bugis yang tidak hanya bersifat biner, tetapi tetap menunjukkan adanya hierarki sosial yang memengaruhi perempuan (Davies, 2015).

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan gambaran penting mengenai perempuan dalam budaya Bugis, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*). Sebagian besar kajian cenderung membahas perempuan Bugis secara terpisah, baik dari aspek budaya, gender, maupun sosial, tanpa secara spesifik mengkaji relasi dialektis antara adat dan patriarki sebagai dua kekuatan yang secara simultan membentuk konstruksi sosial perempuan. Selain itu, masih terbatas kajian yang menempatkan perempuan Bugis sebagai agen aktif yang tidak hanya dipengaruhi oleh budaya, tetapi juga beberapa dalam mentransformasikan nilai-nilai tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi sosial perempuan dalam budaya Bugis dengan menekankan pada hubungan antara adat dan patriarki, serta bagaimana perempuan menegosiasikan posisi mereka dalam konteks perubahan sosial. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika gender dalam budaya lokal, sekaligus membuka ruang bagi pendekatan yang lebih kontekstual dalam mendorong kesetaraan gender berbasis kearifan lokal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (*library research*) untuk menganalisis konstruksi sosial perempuan dalam budaya Bugis dalam relasinya dengan adat dan patriarki. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam berbagai konsep, temuan empiris, serta interpretasi akademik yang telah dihasilkan dalam studi-studi sebelumnya.

1. Sumber dan Kriteria Data

Data penelitian bersumber dari literatur sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik perempuan Bugis, adat, dan patriarki. Kriteria pemilihan sumber, yaitu:

- 1) Kesesuaian dengan topik, yaitu kajian tentang perempuan dalam budaya Bugis, konstruksi sosial, adat Bugis, dan patriarki.
- 2) Relevansi teoritis dan empiris terhadap pembahasan gender dan budaya Bugis.
- 3) Publikasi ilmiah (*peer reviewed*) dalam 10-15 tahun terakhir

Proses penelusuran literatur dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, Garuda, dan jurnal nasional terakreditasi.

2. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dalam literatur yang dikaji. Analisis tematik dipilih karena mampu mengorganisasi data kualitatif yang beragam menjadi kategori konseptual yang sistematis.

Langkah-langkah analisis meliputi:

- 1) Familiarisasi data, yaitu membacaya dan memahami isi literatur secara menyeluruh.
- 2) Open coding, yaitu mengidentifikasi dan memberi kode pada bagian teks yang relevan, seperti konsep poren domestik, nilai siri', dominasi laki-laki, dan agensi perempuan.
- 3) Kategorisasi tema, yaitu mengelompokkan kode ke dalam tema besar, seperti adat budaya Bugis, struktur patriarki, dan negosiasi peran perempuan.
- 4) Interpretasi tematik, yaitu menafsirkan hubungan antar tema untuk memahami konstruksi sosial perempuan Bugis secara komprehensif.

Selain itu, analisis juga mengadopsi pendekatan content analysis (analisis isi) secara kualitatif untuk menelaah makna yang terkandung dalam teks, khususnya terkait representasi perempuan dalam budaya Bugis.

3. Prosedur Sintesis Data

Sintesis data dilakukan melalui pendekatan narrative synthesis, yaitu mengintegrasikan berbagai temuan dari literatur menjadi narasi analitis yang koheren.

Proses sintesis meliputi:

- 1) Pengelompokan temuan berdasarkan kesamaan isu (misalnya peran perempuan, kontrol sosial, dan resistensi budaya).
- 2) Perbandingan antar studi untuk menemukan pola konseptual yang menjelaskan relasi antara adat dan patriarki.
- 3) Penggabungan temuan ke dalam kerangka konseptual yang menjelaskan relasi antara adat dan patriarki.

Dengan cara ini, data yang berasal dari berbagai sumber tidak hanya dirangkum, tetapi juga dianalisis secara kritis untuk menghasilkan pemahaman baru.

4. Proses Produksi Temuan

Temuan dalam penelitian ini dihasilkan melalui proses interpretasi terhadap tema-tema yang telah disintesis. Peneliti mengidentifikasi:

- 1) Pola dominan (misalnya dominasi patriarki dalam praktik adat)
- 2) Kontradiksi (misalnya penghormatan simbolik vs subordinasi praktis)
- 3) Dinamika perubahan (misalnya perempuan sebagai agen negosiasi budaya)

Temuan bukan sekadar rangkuman literatur, melainkan hasil dari analisis kritis dan integratif terhadap berbagai sumber yang menghasilkan pemahaman konseptual baru mengenai konstruksi sosial perempuan Bugis.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi sosial perempuan dalam budaya Bugis menunjukkan karakter yang kompleks dan ambivalen, sebagaimana juga ditemukan dalam berbagai penelitian terdahulu. Perempuan Bugis secara kultural ditempatkan sebagai penjaga kehormatan keluarga melalui nilai *siri'*, yang menjadi fondasi moral dalam kehidupan sosial masyarakat. Sejumlah penelitian, seperti yang dilakukan oleh Idrus, menekankan bahwa posisi ini memberikan perempuan peran simbolik yang penting dalam menjaga stabilitas sosial (Idrus, 2018). Namun demikian, kajian ini menemukan bahwa penekanan terhadap fungsi simbolik tersebut sering kali tidak diikuti dengan analisis kritis terhadap implikasi kekuasaan yang terkandung di dalamnya.

Dalam perspektif ini, konstruksi perempuan sebagai penjaga kehormatan tidak semata-mata mencerminkan penghormatan terhadap perempuan, melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap tubuh dan perilaku perempuan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Walby yang menyatakan bahwa patriarki bekerja melalui institusi budaya dan norma sosial yang tampak alamiah, tetapi sesungguhnya mengandung relasi kuasa yang timpang (Walby, 1991).

Berbeda dengan kecenderungan penelitian sebelumnya yang melihat nilai *siri'* sebagai kearifan lokal yang bersifat positif dan integratif (R et al., 2025), artikel ini menunjukkan bahwa nilai tersebut memiliki ambiguitas makna. Di satu sisi, *siri'* berfungsi sebagai perekat sosial dan sumber etika kolektif, tetapi di sisi lain juga menjadi instrumen legitimasi bagi pembatasan perempuan dalam ruang sosial. Nilai budaya tidak dapat dipahami secara netral, melainkan harus dilihat sebagai arena kontestasi antara adat dan struktur patriarki yang saling berkelindan.

Selain itu, kajian ini juga mengkritisi pandangan yang memosisikan adat Bugis (*pangadereng*) sebagai sistem nilai yang statis dan diwariskan secara linear dari generasi ke generasi. Penelitian terdahulu, seperti Budiarti dan Bini, cenderung menggambarkan adat sebagai struktur yang mapan dan relatif tidak berubah (Zainal, 2016) (Fitriani & Siscawati,

2021). Namun, hasil analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa adat justru bersifat dinamis dan menjadi arena negosiasi sosial yang terus berlangsung.

Perempuan Bugis tidak hanya menjadi objek dari norma adat, tetapi juga berperan sebagai subjek yang secara aktif menafsirkan ulang nilai-nilai tersebut sesuai dengan konteks sosial yang berubah. Misalnya, perempuan yang bekerja di sektor publik tetap menggunakan legitimasi adat sebagai penjaga keluarga, tetapi secara bersamaan memperluas makna peran tersebut ke dalam ranah ekonomi dan profesional. Temuan ini memperluas penelitian Resty yang sebelumnya menyoroti beban ganda perempuan, dengan menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya mengalami tekanan struktural, tetapi juga mengembangkan strategi adaptif dan resistensi kultural dalam menghadapi batasan tersebut (Darmayanti et al., 2025).

Lebih jauh, kajian ini juga memberikan kritik terhadap narasi populer mengenai keberadaan lima gender dalam budaya Bugis yang sering dianggap sebagai bukti inklusivitas gender. Davies menyatakan bahwa pengakuan terhadap kategori *makkunrai*, *oroane*, *calabai*, *calalai*, dan *bissu* mencerminkan sistem gender yang lebih fleksibel dibandingkan masyarakat Barat (Davies, 2015). Namun, temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut lebih bersifat simbolik daripada struktural.

Pada praktik sosial sehari-hari, perempuan (*makkunrai*) tetap berada dalam posisi yang dibatasi oleh norma patriarkal, terutama dalam institusi keluarga dan perkawinan. Terdapat kesenjangan antara pengakuan kultural terhadap keberagaman gender dan realitas sosial yang masih menunjukkan dominasi laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem gender Bugis dapat dipahami sebagai bentuk inklusivitas terbatas, di mana keberagaman diakui secara budaya tetapi belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kesetaraan sosial (Idrus, 2018).

Terkait relasi kekuasaan, patriarki dalam budaya Bugis tidak selalu tampil dalam bentuk dominasi yang eksplisit, tetapi justru bekerja melalui mekanisme kultural yang lebih halus. Patriarki direproduksi melalui internalisasi nilai-nilai budaya, kontrol sosial berbasis rasa malu (*siri'*), serta normalisasi peran gender tradisional. Menariknya, perempuan juga turut berperan dalam mereproduksi nilai-nilai tersebut, baik melalui praktik pengasuhan, pendidikan keluarga, maupun tekanan sosial antar perempuan. Hal ini memperkuat argumen Connell mengenai *gender order*, di mana struktur dominasi gender dipertahankan melalui praktik sosial yang berulang dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar (Connell, 2005). Sehingga patriarki dalam masyarakat Bugis tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan simbolik, sehingga lebih sulit untuk diidentifikasi dan ditantang.

Meskipun demikian, kajian ini juga menemukan adanya transformasi signifikan dalam posisi perempuan Bugis, terutama terkait dengan hal modernisasi dan globalisasi. Perempuan Bugis saat ini semakin aktif dalam mengakses pendidikan tinggi, memasuki dunia kerja, serta terlibat dalam berbagai aktivitas sosial dan politik. Berbeda dengan pandangan sebelumnya yang melihat perubahan ini sebagai bentuk konflik antara tradisi

dan modernitas (Fitriani & Siscawati, 2021), artikel ini menunjukkan bahwa perempuan Bugis justru mengembangkan strategi hibriditas budaya. Mereka tidak sepenuhnya meninggalkan adat, tetapi juga tidak tunduk secara total pada struktur patriarki. Sebaliknya, mereka melakukan negosiasi terhadap identitas dan peran mereka dengan cara menggabungkan nilai-nilai tradisional dan modern secara simultan.

Perempuan Bugis dapat dipahami sebagai agen aktif dalam proses konstruksi sosial, bukan sekadar objek dari struktur budaya. Mereka memanfaatkan nilai-nilai adat sebagai sumber legitimasi, sekaligus menggunakannya sebagai ruang untuk memperluas peran dan otonomi. Misalnya, konsep *siri'* sebelumnya banyak dikaitkan dengan moralitas seksual perempuan mulai direinterpretasi sebagai bentuk harga diri yang mencakup keberanian dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Transformasi makna ini menunjukkan bahwa budaya bukanlah entitas yang statis, melainkan sesuatu yang terus dikonstruksi ulang melalui praktik sosial.

Berdasarkan keseluruhan analisis, kajian ini menawarkan kontribusi teoritis berupa konsep negosiasi kultural gender, yaitu proses di mana perempuan Bugis secara aktif menegosiasikan posisi mereka di antara tuntutan adat dan struktur patriarki. Selain itu, kajian ini juga mengusulkan model triadik konstruksik gender Bugis yang terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu adat sebagai struktur normatif, patriarki sebagai struktur kekuasaan, dan perempuan sebagai agen yang memiliki kapasitas untuk menegosiasikan keduanya. Model ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial perempuan tidak dapat dipahami secara deterministik, tetapi harus dilihat sebagai hasil interaksi dinamis antara struktur dan agensi.

Kebaruan utama dari kajian ini terletak pada upaya untuk menggeser perspektif dari pendekatan deskriptif menuju analisis kritis yang menempatkan perempuan Bugis sebagai subjek aktif dalam proses konstruksi sosial. Kajian ini tidak hanya mengkritisi keterbatasan penelitian sebelumnya yang cenderung normatif dan simbolik, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual baru untuk memahami dinamika gender dalam budaya lokal yang sedang mengalami transformasi.

Simpulan

Konstruksi sosial perempuan dalam budaya Bugis tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai bentuk subordinasi maupun penghormatan, melainkan sebagai hasil interaksi dinamis antara nilai adat (*pangadereng*), struktur patriarki, dan agensi perempuan itu sendiri. Kajian ini menunjukkan bahwa nilai budaya seperti *siri'* tidak bersifat netral, tetapi mengandung ambiguitas, di satu sisi berfungsi sebagai fondasi moral dan identitas kolektif, namun di sisi lain menjadi instrumen kontrol sosial terhadap perempuan. Berbeda dengan kecenderungan penelitian sebelumnya yang menempatkan perempuan dalam posisi pasif, kajian ini menegaskan bahwa perempuan Bugis merupakan subjek aktif yang mampu menegosiasikan peran dan identitasnya di tengah tekanan budaya dan struktur kekuasaan.

Temuan penting lainnya adalah bahwa adat Bugis bukanlah sistem yang statis, emalinkan arena negosiasi yang memungkinkan reinterpretasi nilai sesuai dengan konteks sosial kontemporer. Dalam hal ini, perempuan Bugis tidak sekadar mengalami beban ganda akibat patriarki, tetapi juga mengembangkan strategi kultural untuk memperluas ruang gerakannya, baik dalam ranah domestik maupun publik. Kajian ini kemudian menawarkan kontribusi teoritis berupa konsep negosiasi kultural gender serta model triadik konstruksi gender Bugis yang menempatkan adat, patriarki, dan agensi perempuan sebagai tiga elemen yang saling berinteraksi dalam membentuk realitas sosial.

Adapun saran yang dapat diajukan dari kajian ini adalah perlunya pendekatan yang lebih kritis dan kontekstual dalam memahami budaya lokal, khususnya dalam isu gender, agar tidak terjebak pada romantisasi adat yang justru menutupi praktik ketimpangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris berbasis lapangan guna menggali pengalaman langsung perempuan Bugis dalam berbagai lapisan sosial, sehingga dapat memperkaya temuan yang masih berbasis kajian literatur. Selain itu, penting bagi pemangku kebijakan dan institusi pendidikan untuk mendorong reinterpretasi nilai-nilai budaya yang lebih inklusif dan berkeadilan gender, tanpa harus menghilangkan identitas kultural yang telah mengakar dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aulia, S. S., Marzuki, S., Suyato, & Arpanudin, I. (2024). Women in gender equality movement: A systematic literature review. *Frontiers in Sociology*, 9, 1432383. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1432383>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Women and Men in Indonesia 2024*. BPS RI
- Cameron, L. (2023). Gender equality and development: Indonesia in a global context. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 179–207. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2229476>
- Connell, R. W. (2005). *Masculinities* (Second edi). University of California Press.
- Darmayanti, R. R., Kamaruddin, S. A., & Adam, A. (2025). Modal Budaya dan Mobilitas Sosial Perempuan Bugis Makassar : Peran Pendidikan dalam Perspektif Bourdieu. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 2996–3004.
- Davies, S. G. (2015). *GENDER DIVERSITY IN INDONESIA: Sexuality, Islam, and Queer Selves*. Routledge.
- Fitriani, A. B., & Siscawati, M. (2021). Posisi Perempuan Bugis Dalam Tradisi, Ritual Dan Norma Budaya Siri. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 21(2), 1–14. <https://doi.org/10.32795/ds.v21i2.2126>
- Hermawati, H., Khoidir, M., Syaifullah, S., & Mahfudz, A. (2025). Protection Bissu right in the Bugis Arajang ritual. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 22(2), 476–486. <https://doi.org/10.21831/jc.v22i2.85778>
- Idrus, N. I. (2018). *Gender Relations is an Indonesian Society: Bugis Practices of Sexuality and*

Marriage (pp. 317–319). <https://doi.org/10.1163/22134379-17402010>

- Munawarah, Z. (2024). Keberagaman gender di Indonesia: Analisis wacana pemberitaan gender pada suku Bugis. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 5(2). <https://doi.org/10.31539/joppas.v5i2.9483>
- Nur, R. J., & Komariah, S. (2023). Gender dynamics analysis: Uncovering the roles and identities of Bugis-Makassar women. *Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 4(2), 216–226. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v4i2.432>
- Ridwan, A., Mustafa, R. K., Syaifullah, K., & Adawiah, W. (2024). Women and ecofeminism: A phenomenological study of female artisans. *Journal of Social Dynamics and Governance*, 1(2), 79–91
- R, N. R., Ruyadi, Y., & Wilodati. (2025). Aktualisasi Nilai Siri' Na Pacce pada Masyarakat Suku Bugis-Makassar di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 10, 57–71.
- Walby, S. (1991). *Theorizing Patriarchy*. British Library.
- Zahrawati, F. (2024). Makna simbolik di balik perhiasan emas perempuan suku Bugis. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 26(2).
- Zainal. (2016). Dominasi Laki-Laki Terhadap Perempuan Bugis. *Jurnal Etnorefika*, 5(3), 226–235.